

**DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM
IMPLEMENTASI KERJASAMA BELT AND ROAD
INITIATIVE: TANTANGAN DAN PROSPEK DI BAWAH
KEPEMIMPINAN JOKOWI**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

DISUSUN OLEH:

**Nathanael Christofer Yunus
E061201113**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI
KERJASAMA BELT AND ROAD INITIATIVE: TANTANGAN DAN
PROSPEK DI BAWAH KEPEMIMPINAN JOKOWI**

**Disusun dan diajukan oleh
NATHANAEL CHRISTOFER YUNUS
E061201113**

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik**

**Universitas Hasanuddin
DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM
IMPLEMENTASI KERJASAMA BELT AND ROAD
INITIATIVE: TANTANGAN PROSPEK DI BAWAH
KEPEMIMPINAN JOKOWI

N A M A : NATHANAEL CHRISTOFER YUNUS

N I M : E061201113

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 27 Agustus 2024



Mengetahui :

Pembimbing I,

Prof. H. Darwis, MA, Ph.D
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,

Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR
NIP. 198909132024061001

Mengesahkan :

Plt. Ketua Departemen Hubungan Internasional,

Prof. Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si.
NIP. 197508182008011008

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KERJASAMA BELT AND ROAD INITIATIVE: TANTANGAN PROSPEK DI BAWAH KEPEMIMPINAN JOKOWI

N A M A : NATHANAEL CHRISTOFER YUNUS

N I M : E061201113

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Senin, 26 Agustus 2024.



Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D

Darwis
.....
Shit
.....

Sekretaris : Mashita Dewi Tidore, S.IP, MA

Anggota : 1. Seniwati, S.Sos, M.Hum, Ph.D

Seniwati
.....
Munjin
.....

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR.....

Abdul Razaq
.....

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nathanael Christofer Yunus
NIM : E061201113
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

***“DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI KERJASAMA
BELT AND ROAD INITIATIVE: TANTANGAN DAN PROSPEK DI BAWAH
KEPEMIMPINAN JOKOWI”***

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain kecuali kutipan dari ringkasan yang setiap salah satunya telah saya jelaskan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 24 September 2024
Yang menyatakan,



Nathanael Christofer Yunus

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nathanael Christofer Yunus

NIM : E061201113

Program Studi : Hubungan Internasional

Departemen : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi Kerjasama Belt And Road Initiative: Tantangan Dan Prospek Di Bawah Kepemimpinan Jokowi”

Bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-Eksklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Makassar
Pada Tanggal : 24 September 2024

Yang menyatakan,

(Nathanael Christofer Yunus)

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas segala karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi Kerjasama Belt And Road Initiative: Tantangan Dan Prospek Di Bawah Kepemimpinan Jokowi” ini dengan baik. Tidak lupa ucapan syukur yang tidak henti-hentinya penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai dan memberi kekuatan selama ini.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak hal yang telah penulis lewati hingga sampai titik saat ini. Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada orang tua penulis, Mama **Helty** yang tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan dan cintanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Kepada Papa **Yunus Tahir** yang selalu memberikan kekuatan dan sebagai pengingat untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup. **Naftali Angel, Nico Devid** terima kasih telah menjadi saudara yang sangat mensupport penulis hingga akhir, terima kasih atas saran, kritikan dan cintanya kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, saran, serta kritik dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan rasa syukur kepada pihak-pihak yang telah hadir selama proses penulisan hingga selesainya skripsi ini.

1. Terima kasih kepada Dekan FISIP UNHAS **Bapak Prof. Dr. Phil. Sukri, S.I.P., M.Si** dan Wakil Dekan FISIP UNHAS **Ibu Prof. Dr. Hasniati, S.Sos.,M.Si.** dan **Bapak Dr. Moehammad Iqbal Sultan, M.Si.**, serta **Bapak Prof. Dr. Suparman, M.Si** yang telah membantu penulis dalam segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Terima kasih kepada Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS **Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** dan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP UNHAS **Bapak Aswin Baharuddin, S.IP, MA**, yang telah memberikan bantuan dan arahan serta ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan dan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan.
3. Terima kasih kepada dosen Hubungan Internasional FISIP UNHAS yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan, kepada **Bapak H.Abdul Razaq Z.Cangara S.IP., MIR, Bapak Dr. H.Husain Abdullah M.Si, Bapak Dr. Patrice Lumumba, MA, Bapak Muh.Nasir Badu, S.Sos., M.Hum., Ph.D., Bapak Ishaq Rahman S.IP., M.Si., Ph.D.(Cand.), Bapak Drs. H.M. Imran Hanafi M.A., M.Ec, Bapak Burhanuddin S.IP. M.Si, Bapak Dr. Munjin Syafik Asy'ari M.SI, Bapak Dr. H. Adi Suryadi Culla MA, Bapak Agussalim Burhanuddin S.IP., MIRAP Ph.D (Cand.), Bapak Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Si., L.LM, Bapak Muh.Ashry Sallatu S.IP., M.Si, Ibu Nurjannah Abdullah S.IP., M.A, Ibu Pusparida Syahdan S.Sos., M.S,**

Ibu Mashita Dewi Tidore, S.IP., M.A., Ibu Nur Isdah S.IP., MA.

Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu diberi kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan.

4. Terima kasih banyak kepada **Bapak Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** selaku Pembimbing I, dan **Bapak H.Abdul Razaq Z.Cangara S.IP., MIR** selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Tuhan.
5. Terima kasih kepada staf dan pegawai Departemen Ilmu Hubungan Internasional **Ibu Rahma** dan **Pak Ridho** yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga selesai.
6. Terima Kasih kepada seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuannya kepada penulis dalam pengurusan berkas selama perkuliahan.
7. Terima kasih buat teman-teman kuliah penulis dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan ini, **Nesyu, Vicha, Aal, Ginayah, Meu, Stenly, Athalia** yang telah menemani penulis selama proses penulisan skripsi ini walaupun terkadang lebih banyak mainnya, tapi kehadiran teman-teman sekalian memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
8. Terima Kasih kepada teman-teman penulis, **Circle pinggir jurang (Nesy, Gery, Sonmen, Agung, Herson, Yolani)** yang selalu ada saat penulis butuh, telah menemani penulis

dan memberikan doa dan semangat saat proses penulisan skripsi ini berlangsung.

9. Terima kasih kepada **Magnet Emmanuel : Agnes, Angel, dll** yang telah kebersamai dan memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada **Kak Wempy** dan **Kak Lina** yang senantiasa mendoakan dan menemani selama proses Menyusun skripsi.
11. Terimakasih kepada **Evelyn Peterlim** dan **Venantius Ivan W**, yang senantiasa membantu mendengarkan keluh kesah dan menemani bahkan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi dikala sibuk memburu cuan.
12. Terima Kasih kepada teman-teman **ALTERA 2020** yang telah memberikan bantuan-bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Terima kasih pada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-satu, keluarga besar, teman-teman penulis dan orang-orang yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis.

ABSTRAK

Nathanael Christofer Yunus, (E061201113), “Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi Kerjasama Belt And Road Initiative: Tantangan Dan Prospek Di Bawah Kepemimpinan Jokowi”, di bawah bimbingan **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** selaku pembimbing I dan **H.Abdul Razaq Z.Cangara S.IP., MIR,** selaku pembimbing II pada departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi ekonomi Indonesia dalam pelaksanaan Belt and Road Initiative (BRI) di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dengan fokus pada tantangan dan prospek kerjasama ekonomi. Menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat ketidakpastian politik dan ekonomi global, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kerjasama bilateral melalui strategi diplomasi yang efektif.

Kebaharuan penelitian ini terletak pada analisis spesifik kebijakan diplomasi ekonomi di era Jokowi, yang menitikberatkan pembangunan infrastruktur, serta mempertimbangkan dinamika kontemporer dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini memberikan perspektif baru tentang bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan perubahan geopolitik di Asia Tenggara dan persaingan global dalam konteks BRI. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat berbagai tantangan, seperti ketidakpastian politik dan ekonomi global, Indonesia memiliki peluang yang signifikan untuk memperkuat kerjasama bilateral melalui strategi diplomasi yang efektif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai dinamika diplomasi ekonomi Indonesia dan menjadi referensi bagi penelitian di masa mendatang.

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, Belt and Road Initiative, Indonesia, Tiongkok

ABSTRAK

Nathanael Christofer Yunus, (E061201113), “Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi Kerjasama Belt And Road Initiative: Tantangan Dan Prospek Di Bawah Kepemimpinan Jokowi”, under the guidance of Prof. H. Darwis, MA, Ph.D as the first supervisor and H.Abdul Razaq Z.Cangara S.IP., MIR, as the second supervisor at the Departement of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University

This research aims to analyze Indonesia's economic diplomacy in the implementation of the Belt and Road Initiative (BRI) cooperation under the leadership of President Joko Widodo. By applying the desk study method, this research collects and analyzes data from various literature sources, including books, scientific journals, and relevant articles. The main focus of this research is to identify the challenges Indonesia faces in implementing economic diplomacy as well as explore the prospects for economic cooperation with countries involved in the BRI.

The novelty of this research lies in the specific analysis of economic diplomacy policies in the Jokowi era, which emphasizes infrastructure development, as well as considering contemporary dynamics in its implementation. This research provides a new perspective on how Indonesia can take advantage of geopolitical changes in Southeast Asia and global competition in the context of the BRI. This research found that despite challenges, such as global political and economic uncertainty, Indonesia has significant opportunities to strengthen bilateral cooperation through effective diplomacy strategies. This research is expected to contribute to the understanding of the dynamics of Indonesia's economic diplomacy and serve as a reference for future research.

Kata Kunci: *Economic Diplomacy, Belt and Road Initiative, Indonesia, China*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Kerangka Konsep.....	12
1. Diplomasi Ekonomi	13
2. Kerjasama Ekonomi Bilateral	19
E. Variabel Operation.....	23
F. Metode Penelitian	27
1. Teknik Analisis	27
2. Teknik Pengumpulan Data	28
3. Tipe Penelitian	28
4. Jenis dan Sumber Data	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Diplomasi Ekonomi	30
B. Kerjasama Bilateral.....	37
C. Penelitian Terdahulu	44
BAB III GAMBARAN UMUM	52
A. Kerja Sama Belt and Road Intiative	54
B. Diplomasi Ekonomi Indonesia.....	65
BAB IV PEMBAHASAN	78
A. Bentuk-bentuk Diplomasi Ekonomi Indonesia di BRI di Masa Pemerintahan Jokowi.....	79
B. Tantangan dan Prospek Diplomasi Ekonomi Indonesia	93
BAB V PENUTUP.....	107
A. Kesimpulan	107
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA.....	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Variabel Operation Penelitian.....	24
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Kerangka Konseptual	12
Gambar 3.1	Peta Silk Road Economic Belt & Maritime Silk Road.....	55
Gambar 3.2	Peta Silk Road Economic Belt.....	57
Gambar 3.3	Persentasi Pengembangan BRI.....	63
Gambar 4.1	Program Whoosh Experience	90
Gambar 4.2	Program Pelabuhan Kuala Tanjung	91
Gambar 4.3	Kawasan Industri Morowali	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, Tiongkok menjadi salah satu negara yang mampu menginisiasi sejumlah inisiatif ekonomi dengan melakukan pembangunan infrastruktur secara masif, dan mampu meningkatkan nilai dan jumlah investasi ke negara lain. Puncak dari semua kemajuan Tiongkok dalam kekuatan ekonominya adalah ketika Presiden Xi Jinping menginisiasi “*one belt one road*” (Esteban, Otero-Iglesias, 2015). *One Belt One Road* (OBOR) kemudian di sempurnakan secara intitusional dan berganti nama menjadi “*Belt and road initiative*” (BRI). Secara dasar *Belt and Road Initiative* dirancang untuk menjadikan Tiongkok sebagai pusat dari lalu lintas aktivitas ekonomi dan perdagangan di dunia. Dari kebijakan ini dapat dilihat bahwa Tiongkok terinspirasi dari “jalur sutera kuno” yang dimana jalur ini menghubungkan Tiongkok dengan berbagai negara untuk berdagang. Jalur ini mencapai wilayah Eropa, Wilayah Asia Tenggara hingga kerajaan Sriwijaya yang berpusat di pulau Sumatera, jalur ini membuat Tiongkok saat itu sangat sukses. Hal inilah yang menginspirasi dibentuknya *Belt and Road Initiative*.

BRI telah mengaitkan lebih dari 65 negara yang mencakup lebih dari 62% dari total populasi dunia, 35% perdagangan global, dan lebih dari 31% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dunia. BRI berfokus pada lima tujuan pokok, termasuk (I) Koordinasi Kebijakan, yang bertujuan untuk

mendorong kerja sama antarnegara dalam mewujudkan proyek pembangunan; (II) Pertukaran Budaya, di mana BRI bertindak sebagai penghubung dalam memfasilitasi koneksi antarindividu dan interaksi yang saling mendukung dengan pemahaman budaya yang baik antarperusahaan di negara-negara yang terlibat, untuk mendorong kerja sama internasional yang efektif; (III) Integrasi Keuangan, di mana BRI dimaksudkan untuk memperkuat kerja sama moneter dan keuangan guna mengatasi risiko keuangan secara bersama-sama; (IV) Perdagangan dan Investasi, dengan harapan bahwa melalui BRI, perdagangan dan investasi lintas batas akan menjadi lebih lancar dan kolaboratif untuk mempromosikan integrasi ekonomi; (V) Konektivitas Fasilitas, di mana BRI bertujuan untuk membangun infrastruktur yang mendukung konektivitas yang lebih luas, seperti perbaikan infrastruktur, pengembangan berbagai mode transportasi seperti kereta api, pembangunan pelabuhan, pembangunan jalan raya, peningkatan infrastruktur transmisi listrik, dan lain sebagainya. (Putri and Ma'arif, 2019)

Belt and Road Initiative adalah proyek terstruktur yang perlu dibangun secara kolaboratif melalui dialog untuk memperhatikan kepentingan semua pihak, dengan upaya untuk mengkoordinasikan strategi pembangunan negara-negara yang terletak di sepanjang rute kebijakan ini. Menurut pandangan dan tindakan dalam kerangka kebijakan ekonomi Belt and road, yang mengacu pada Jalan Sutra Maritim Abad ke-21, jaringan tersebut melintasi Asia, Eropa, dan Afrika, menghubungkan pusat-pusat

ekonomi yang berpengaruh di Asia Timur dengan pasar di Eropa, serta mencakup negara-negara yang memiliki potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi (Huping Shang, 2019).

Gagasan ini memiliki implikasi yang signifikan bagi ekonomi dan politik di wilayah tersebut, tidak hanya untuk Tiongkok tetapi juga untuk negara-negara lain di Asia. Tiongkok telah menghadapi tuntutan untuk menciptakan perdamaian, pembangunan, kerja sama, dan saling menguntungkan di dunia. Bersaing dengan cara yang menyebabkan kerugian harus dihindari. Hal ini telah menyebabkan reformulasi *Belt and Road Initiative* Tiongkok untuk menghadapi situasi ekonomi global yang kompleks dan tantangan internasional. Salah satu dukungan untuk jalan sutra maritim Tiongkok adalah untuk mengembangkan konsep ekonomi biru, yang berfokus pada industri kelautan dan pemanfaatan maksimum sumber daya laut (Rustam, 2020).

Indonesia menjadi salah satu negara yang menarik perhatian Tiongkok dalam pengembangan proyek BRI. Setidaknya, Indonesia dipilih sebagai tempat untuk mengumumkan Maritime Silk Road oleh Presiden Xi Jinping setelah sebelumnya mendeklarasikan proyek Silk Road di Kazakhstan beberapa bulan sebelumnya, Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar di kawasan ini dan memiliki potensi ekonomi yang signifikan. Dalam konteks ini, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang secara langsung terdampak oleh *Belt and Road Initiative*.

Diplomasi ekonomi telah menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Hal ini tercatat dalam Arah Kebijakan dan

Strategi Renstra Kemlu Tahun 2015-2019, yang menguraikan delapan arah kebijakan Indonesia. Empat pilar diplomasi ekonomi Indonesia meliputi: (1) memperluas dan meningkatkan akses pasar produk Indonesia dengan mendorong para diplomat Indonesia untuk terlibat secara aktif dengan turun langsung ke lapangan; (2) memperkuat kapasitas dan sumber daya perwakilan Indonesia di pasar non-tradisional atau untapped market; (3) mendorong investasi asing di sektor-sektor prioritas Indonesia serta melindungi investasi Indonesia di luar negeri; (4) memanfaatkan ASEAN Economic Community (AEC). Secara singkat, diplomasi ekonomi Indonesia terbagi menjadi tiga aspek utama, yaitu perdagangan, investasi, dan pariwisata (Trade, Tourism, Investment/TTI) (Nabilla, 2021).

Dalam upaya untuk memperkuat posisinya di panggung internasional, Indonesia telah aktif terlibat dalam berbagai inisiatif kerjasama regional dan multilateral. Salah satu inisiatif yang menjadi fokus perhatian adalah *Belt and road initiative* (BRI) yang digagas oleh Republik Rakyat Tiongkok. Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat hubungan dengan Tiongkok dan meningkatkan kerjasama ekonomi regional, Indonesia telah menunjukkan minat yang besar dalam terlibat dalam proyek-proyek infrastruktur dan investasi yang terkait dengan BRI.

Diplomasi ekonomi Indonesia dalam konteks kerjasama *Belt and Road Initiative* mengacu pada upaya pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan peluang yang tercipta oleh inisiatif tersebut, sambil memperjuangkan kepentingan nasional dan memastikan bahwa kerjasama

tersebut memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak. Diplomasi ekonomi Indonesia di atas merupakan wadah atau arena bagi Indonesia untuk mencari kawan yang bisa dijadikan mitra strategis Indonesia dalam membangun stabilitas ekonomi. Indonesia menjadikan pertemuan-pertemuan tersebut sebagai arena menempatkan posisi untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional, regional dan global (Astuti and Fathun, 2020).

Strategi maritim Tiongkok melibatkan pembangunan navigasi dan fasilitas keamanan di sepanjang rute yang ditetapkan. Rute ini akan berpotongan dengan wilayah utara Indonesia, khususnya Laut Natuna Utara, yang secara langsung berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan. Laut Natuna Utara adalah daerah yang disengketakan antara negara -negara Tiongkok dan ASEAN, tetapi menghadirkan peluang signifikan bagi ekonomi maritim Indonesia. Lebih dari 50% cadangan minyak Indonesia dan produksi berasal dari Provinsi Riau, yang terletak di daerah ini.

Selain itu, Laut Natuna Utara adalah sumber perikanan penangkapan dan akuakultur. Untuk memastikan keamanan maritim yang komprehensif, penting untuk melindungi sumber daya alam di bidang ini. Posisi strategis Indonesia antara dua kekuatan global, AS dan Tiongkok, membutuhkan respons strategis, terutama dalam hal perlindungan keamanan. Sebagai negara maritim, kebijakan Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo bertujuan untuk mengembalikan identitas negara sebagai negara maritim yang kuat,

dan konsep Indonesia sebagai sumbu maritim dunia harus sepenuhnya ditunjukkan (Rustam, 2020).

Sejak diluncurkan, melalui proyek *Belt and Road Initiative* Tiongkok menjalankan diplomasi ekonomi dengan menawarkan sejumlah proyek investasi dan kerjasama infrastruktur kepada Indonesia dalam kerangka BRI. Proyek-proyek ini mencakup berbagai sektor seperti pembangunan pelabuhan, jalan tol, kereta api, dan energi. Kerjasama ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan konektivitas infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Indonesia meluncurkan pandangan baru tentang kebijakan luar negerinya berjudul *Global Maritime Fulcrum (GMF)*. Pandangan baru tentang kebijakan luar negerinya didasarkan pada sejarah Indonesia yang kaya sebagai keadaan kepulauan. Untuk menerapkan dan mencapai tujuan GMF, percepatan pengembangan maritim perlu dilakukan untuk kesejahteraan Orang Indonesia. Saat melakukannya, GMF harus dapat disinergikan dengan berbagai inisiatif regional di seluruh dunia seperti ACT East dari India, Komunitas ASEAN, dan inisiatif sabuk dan jalan (BRI) dari rakyat Republik Tiongkok (Prakoso et al., 2022).

Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam proyek infrastruktur telah terbukti efektif. Kedua negara telah menekankan pentingnya sektor infrastruktur dalam kebijakan luar negeri mereka. Lebih lanjut, Tiongkok

terkenal sebagai negara yang melakukan industrialisasi secara besar-besaran. Dalam proyek Light Rail Transit (LRT) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan berbagai sistem perkeretaapian. Investasi asing dari Tiongkok pada paruh pertama tahun 2018 mencapai nilai sebesar USD 1,34 miliar atau setara dengan Rp 18 triliun. Angka tersebut menyumbang sebanyak 8,8% dari total Penanaman Modal Asing (PMA) ke Indonesia yang mencapai USD 15,2 miliar.

Berdasarkan laporan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sektor-sektor yang paling banyak mendapat investasi atau PMA di Indonesia antara Januari hingga Maret 2019 adalah sektor listrik, gas, dan air, transportasi, dan telekomunikasi. Sektor listrik, gas, dan air menerima investasi sebesar Rp 117,5 triliun, sementara transportasi, gudang, dan telekomunikasi menerima Rp 94,9 triliun. Sektor pertambangan juga mendapat investasi signifikan sebesar Rp 73,8 triliun, diikuti oleh sektor industri makanan dengan Rp 68,8 triliun, dan sektor perumahan, kawasan industri, dan perkantoran dengan Rp 56,8 triliun.

Indonesia mengembangkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung dan Thailand dengan Singapore-Kunming Rail Link (SKRL) yang melibatkan beberapa negara ASEAN, seperti Singapura, Laos, Myanmar, Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. Proyek HSR yang dibiayai Pemerintah Tiongkok di Indonesia dan Thailand dianggap sebagai “*developmental railpolitics*”. Melalui proyek pembangunan HSR, Tiongkok berupaya memperluas kontrol

politik di dua negara tersebut. Tiongkok memanfaatkan kekuatan ekonomi dalam memajukan kepentingan geopolitikanya. Sementara bagi Indonesia dan Thailand, Tiongkok memiliki andil penting dan berkontribusi pada pembangunan infrastruktur. HSR dianggap sebagai solusi untuk mengatasi hambatan sistem transportasi Indonesia dan Thailand, seperti kapasitas teknologi kereta api yang masih lemah dan sumber finansial yang terbatas. Kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam proyek infrastruktur telah terbukti efektif. Kedua negara telah menekankan pentingnya sektor infrastruktur dalam kebijakan luar negeri mereka. Lebih lanjut, Tiongkok terkenal sebagai negara yang melakukan industrialisasi secara besar-besaran. Dalam proyek Light Rail Transit (LRT) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah Tiongkok untuk mengembangkan berbagai sistem perkeretaapian (Putri and Ma'arif, 2019).

Selain proyek Kereta Cepat (HSR) dan Light Rail Transit (LRT), proyek berikutnya adalah pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu). Konstruksi untuk Seksi 1 jalan tol Cisumdawu, yang berlokasi dari Cileunyi hingga Rancakalong dengan panjang 11,45 km, telah dimulai pada awal tahun 2018. Nilai kontrak untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu mencapai Rp 2,2 triliun. Pendanaan untuk pembangunan Tol Cisumdawu disediakan melalui tiga tahap pinjaman dari Pemerintah Tiongkok. Tahap I dan II ditujukan untuk konstruksi pada Seksi 2, sementara tahap III digunakan untuk mendanai pembangunan di Seksi 1. Tol

Cisumdawu, yang memiliki total panjang 61,6 km, merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN) yang digulirkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dengan target penyelesaian seluruhnya pada tahun 2019.

Berdasarkan konsep kerja sama internasional, penulis menyoroti, bahwa kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam program BRI tidak dapat dipisahkan dari berbagai negara lain yang terlibat dalam BRI. Keduanya dapat bermitra di berbagai proyek dengan pendanaan dari kedua belah pihak ataupun melibatkan negara dan institusi lain. Kemitraan antara Indonesia dan Tiongkok. Kedekatan geografis antara Indonesia dan Tiongkok juga semakin mendorong keduanya untuk bekerja sama. Dalam konteks kerja sama internasional, penting untuk dicatat bahwa kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok dalam program BRI tidak dapat dipisahkan dari partisipasi negara-negara lain yang turut terlibat dalam BRI. Kedua negara dapat menjadi mitra dalam beragam proyek yang didanai baik secara bersama-sama maupun dengan melibatkan negara dan institusi lainnya. Kemitraan antara Indonesia dan Tiongkok juga dipengaruhi oleh kedekatan geografis keduanya, yang semakin mendorong mereka untuk berkolaborasi. Dari data di atas, jelas bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dalam menjalankan BRI memiliki beberapa konteks yang berbeda, mulai dari pengembangan infrastruktur, pengembangan industri, sampai dengan pengembangan koneksi antar negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan BRI sebagai alat untuk membangun hubungan ekonomi

dengan negara-negara lainnya, serta memperkuat posisinya dalam konteks global (Astuti and Fathun, 2020).

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dinilai bahwa penelitian ini ingin mengkaji lebih jauh tentang tantangan dan prospek diplomasi ekonomi Indonesia dalam konsep BRI. Penulis mengangkat judul *“Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Implementasi Kerjasama Belt and Road Initiative : Tantangan dan Prospek di Bawah Kepemimpinan Jokowi.”*

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada upaya diplomasi ekonomi yang dilakukan oleh Indonesia dalam konteks implementasi kerjasama *Belt and Road Initiative* (BRI). Diplomasi ekonomi mencakup strategi, kebijakan, dan langkah-langkah konkret yang dilakukan oleh Indonesia untuk memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara yang terlibat dalam BRI dan mengidentifikasi dan menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam upaya mendorong kerjasama ekonomi melalui BRI, Penelitian ini juga akan memeriksa bagaimana Indonesia mengimplementasikan kerjasama BRI dalam konteks diplomasi ekonominya. Ini mencakup analisis terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintahan Jokowi untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dengan negara-negara yang terlibat dalam BRI.

Penelitian ini akan mempertimbangkan periode kepemimpinan Jokowi sebagai konteks utama. Ini mencakup rentang waktu tertentu yang

berkaitan dengan kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintahan Jokowi dalam upaya meningkatkan kerjasama ekonomi Indonesia melalui BRI dan dibatasi dalam kurun waktu 2014-2024, Mengingat tahun 2014-2024 adalah masa jabatan Presiden Jokowi. Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk diplomasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dalam implementasi kerjasama *Belt and Road Initiative*?
2. Bagaimana tantangan dan prospek diplomasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi dalam implementasi kerjasama *belt and road initiative*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

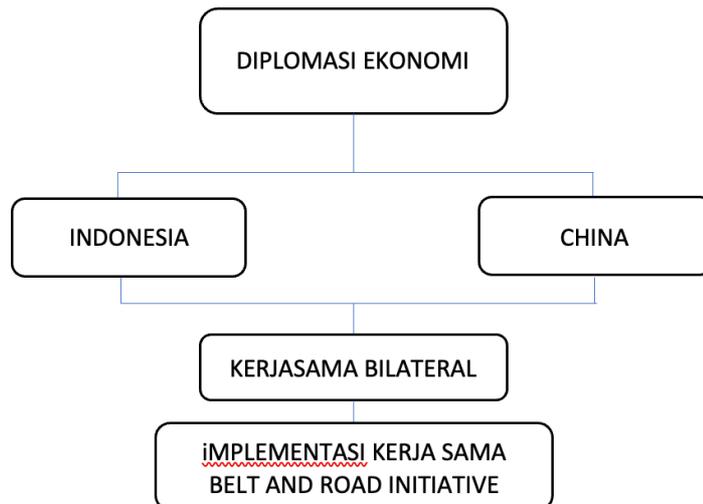
1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana bentuk diplomasi ekonomi Indonesia dalam implementasi diplomasi ekonomi terkait dengan BRI di bawah kepemimpinan Jokowi.
 - b. Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana prospek dan tantangan kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang terlibat dalam BRI di masa depan, mengingat tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintahan Jokowi.

2. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan dari penelitian ini tercapai, maka penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai :

- a. Referensi tentang apa saja tantangan utama yang dihadapi oleh Indonesia dalam implementasi diplomasi ekonomi terkait dengan BRI di bawah kepemimpinan Jokowi.
- b. Sumber referensi untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana prospek kerjasama ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang terlibat dalam BRI di masa depan, mengingat tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintahan Jokowi.

D. Kerangka Konsep



Gambar 1.1 : Bagan Kerangka Konseptual.

1. Diplomasi Ekonomi

Secara etimologis, diplomasi ekonomi menggabungkan dua konsep, yakni diplomasi dan ekonomi, yang muncul dari bidang ilmu dengan pandangan dunia (dan terkadang, cara pandang) yang berbeda. Diplomasi berakar dari studi politik luar negeri, fokusnya pada distribusi kekuasaan di tingkat global, sementara ilmu ekonomi menitikberatkan pada distribusi kekayaan, baik secara lokal maupun global (Muthriana and Killian, 2015). Diplomasi merupakan salah satu praktik hubungan luar negeri yang dilakukan oleh negara dengan negara (bilateral) negara dengan banyak negara (multilateral) maupun hubungan atau kerjasama kewilayahan (regional). Diplomasi dapat dikatakan juga sebagai alat untuk mengharmonisasikan atau mempererat kekerabatan antara negara dengan negara lain. Istilah diplomasi erat kaitannya dengan politik luar negeri yang dimana diplomasi merupakan kegiatan politik luar negeri dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan nasional (Berridge and James, 2003).

Diplomasi ekonomi tidak berdiri sendiri dan terpisah dari diplomasi secara keseluruhan. Dalam prakteknya, diplomasi ekonomi memanfaatkan asumsi dan menerapkan strategi yang serupa dengan diplomasi umum. Namun, terdapat perbedaan yang mencolok yang menjadikan diplomasi ekonomi sebagai domain yang khas untuk dipelajari. Salah satu karakteristik utama diplomasi ekonomi adalah

tingkat sensitivitas dan responsivitasnya yang tinggi terhadap perubahan dan evolusi pasar. Atau dapat dikatakan diplomasi ekonomi bisa dijelaskan sebagai serangkaian proses dalam merumuskan dan mengadakan perundingan mengenai kebijakan terkait produksi, perdagangan barang, jasa, tenaga kerja, serta investasi, bahkan termasuk pertukaran mata uang dan informasi, serta bantuan luar negeri atau *official development*.

Diplomasi ekonomi menjadi instrumen krusial bagi negara-negara dalam berinteraksi di panggung internasional, baik itu dalam kerjasama maupun konflik. Van Bergeijk mengidentifikasi tiga elemen dalam diplomasi ekonomi, yakni: pemanfaatan kekuatan politik dan hubungan untuk mempromosikan atau memengaruhi perdagangan dan investasi, kedua penggunaan aset ekonomi untuk menaikkan biaya konflik dan memperkuat hubungan saling menguntungkan, dan ketiga upaya untuk memperkuat iklim politik dan lingkungan internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dari ketiga elemen tersebut, terlihat perbedaan dalam kemampuan negara-negara dalam melakukan diplomasi ekonomi, yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, baik dalam aspek materiil maupun non-materiil (Ezra Killian, 2012). Salah satu tahap lain di dalam diplomasi ekonomi adalah tahapan *networking*. Dalam tahapan strategi ini, negara akan melakukan sebanyak-banyaknya kemitraan baik antar instansi pemerintah maupun

dengan pihak swasta, kamar dagang, dan aktor lainnya di dalam negeri maupun di luar negeri (Nabilla, 2021).

Diplomasi ekonomi adalah diplomasi yang menggunakan teknik-teknik ekonomi dan perdagangan untuk mencapai tujuan politik. Ada beberapa bentuk instrumen yang digunakan dalam diplomasi ekonomi pada umumnya, yang pertama adalah embargo ekonomi yang dimana Asal usul kata "*embargo*" sebenarnya berasal dari bahasa Italia. Istilah ini berasal dari kata "*embargare*", yang berarti mencegah, memblokir, atau menahan. Setelah itu, kata tersebut diterima dalam bahasa Inggris dan menjadi istilah yang umum digunakan secara internasional untuk merujuk pada pembatasan perdagangan.

Embargo ekonomi merupakan bentuk tegas dari sanksi ekonomi yang diberlakukan oleh satu negara atau sekelompok negara terhadap negara lain, yang menghambat atau bahkan melarang sepenuhnya aktivitas impor dan ekspor barang serta jasa antara keduanya. Metode yang sering digunakan untuk menerapkan hal ini adalah blokade, di mana suatu daerah atau negara dikelilingi dan ditutup sepenuhnya, sehingga tak seorang pun atau apa pun bisa keluar atau masuk dengan bebas. Embargo merupakan tindakan yang melibatkan penghentian atau pengurangan perdagangan serta interaksi ekonomi antara negara yang memberlakukan embargo dan negara atau wilayah yang menjadi targetnya (Hattu, Tuhulele, and Waas, 2023).

Tindakan ini dapat mencakup larangan ekspor atau impor, pelarangan investasi, pemutusan hubungan keuangan, atau bahkan pelarangan perjalanan. Penggunaan embargo dapat ditemui dalam berbagai situasi, termasuk konflik bersenjata, keadaan darurat, pelanggaran HAM, atau untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Diatur dalam ketentuan Hukum Internasional, Pasal 41 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan wewenang kepada Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan tindakan non-militer, termasuk embargo, sebagai langkah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional (United Nations, n.d.).

Foreign debt atau Hutang luar negeri juga merupakan bagian dari instrument diplomasi ekonomi yang dimana hutang luar negeri merupakan bagian dari total hutang sebuah negara yang diperoleh dari kreditor di luar negeri. Bentuk hutang ini bisa berupa uang yang diperoleh dari bank-bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia (Sayuti, Ichsan, and Anwar, 2021). Dari perspektif kreditor atau pemberi pinjaman, penekanan pada penjelasan mengenai pinjaman luar negeri lebih difokuskan pada berbagai faktor yang memastikan pinjaman tersebut akan dikembalikan tepat waktu sesuai dengan manfaat yang telah ditetapkan dalam sebuah perjanjian.

Di sisi lain, dari perspektif debitur atau penerima pinjaman, signifikansi pinjaman luar negeri ditekankan pada faktor-faktor yang

memungkinkan pemanfaatan optimal sambil berharap mendapatkan nilai tambah, serta kemampuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut, dan pada saat yang sama meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara lebih besar (Prasetyo and Kurnia, 2021).

Investasi atau penanaman modal juga merupakan salah satu faktor kunci dalam aktivitas diplomasi ekonomi suatu negara atau daerah. Jumlah investasi yang dijalankan dalam suatu negara memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah negara tersebut. Menurut Dornbusch (1986:236), investasi merujuk pada pengeluaran yang dialokasikan untuk meningkatkan atau mempertahankan komponen-komponen barang modal. Barang modal tersebut meliputi pabrik, mesin, kantor, dan produk-produk tahan lama yang digunakan dalam proses produksi.

Dalam konteks neraca pendapatan nasional, pengeluaran investasi mencakup biaya untuk pabrik dan peralatan baru, investasi dalam persediaan, dan pembangunan rumah tinggal. Dalam konteks ini, peran pemerintah menjadi sangat vital dalam setiap proses investasi, bahkan rekomendasi dari pemerintah daerah merupakan faktor penentu apakah kegiatan investasi di daerah tersebut akan dianggap layak atau tidak (Fatihudin, 2019).

Investasi memiliki peran penting sebagai sumber dana untuk mendukung aktivitas ekonomi, pembangunan infrastruktur, serta penyediaan fasilitas yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu

negara. Secara umum, investasi dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu investasi langsung dan tidak langsung. Investasi tidak langsung, yang sering disebut sebagai investasi portofolio, terjadi melalui pasar keuangan dan cenderung bersifat sementara serta rentan terhadap fluktuasi. Di sisi lain, investasi langsung terjadi langsung melalui sektor riil dan memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Bentuk investasi langsung ini dikenal dengan istilah *Foreign Direct Investment* (FDI) atau Penanaman Modal Asing (PMA) (OECD, 2002).

Sebuah studi oleh Jhinggan (2004) menyimpulkan bahwa *Foreign Direct Investment* (FDI) adalah investasi modal yang dilakukan oleh perusahaan swasta dari luar negeri atau dapat dikatakan sebagai modal yang ditanamkan dari suatu negara ke negara lain atas nama pemilik modalnya, yaitu pemerintah. Menurutnya, FDI memiliki tiga manfaat utama: (1) sebagai cara untuk mengurangi risiko kepemilikan modal dengan melakukan diversifikasi melalui investasi, (2) memberikan kontribusi terbaik dalam pembentukan tata kelola perusahaan, peraturan akuntansi, dan legalitas dalam integrasi pasar modal, dan (3) arus modal secara global membatasi kemampuan pemerintah untuk merancang kebijakan yang kurang tepat. Jhinggan juga menekankan bahwa FDI tidak hanya membawa aliran modal ke negara tertentu, tetapi juga memperkaya negara tersebut dengan mendorong pertukaran keterampilan manajerial dan transfer teknologi baru dari negara asal modal ke negara penerima. Oleh karena itu, FDI

juga berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejak tahun 1970-an, aliran FDI telah meningkat secara signifikan dari kurang dari \$10 miliar menjadi lebih dari \$200 miliar pada tahun 1999. Di antara negara-negara lain, Tiongkok merupakan tuan rumah terbesar bagi FDI. Perusahaan multinasional besar masih menjadi kontributor utama dalam aliran FDI (UNCTAD) (Jhigan, 2004).

Diplomasi ekonomi di setiap negara pasti memiliki peluang dan tantangan dalam setiap proses yang dijalaninya. Dalam praktik dan strategi kebijakan luar negeri, diplomasi ekonomi menegaskan bahwa hubungan antara kepentingan ekonomi dan politik tak dapat dipisahkan dan justru saling memperkuat. Program KSS Indonesia merupakan bagian dari pendekatan yang disebut sebagai "inducements" dalam diplomasi ekonomi. Ini mengartikan bahwa diplomasi ekonomi dipandang sebagai alat untuk mencapai stabilitas ekonomi di tengah sistem internasional yang cenderung kacau. Dengan perspektif liberalisme, negara-negara berupaya untuk memahami dinamika interaksi ekonomi internasional yang terkait erat dengan kepentingan ekonomi (Hutabarat and Damayanti, 2023).

2. Kerjasama Ekonomi Bilateral

Kerjasama bilateral merupakan salah satu bentuk dari Kerjasama internasional, Kerjasama Internasional adalah kegiatan atau usaha

yang dilakukan oleh suatu negara yang menyangkut aspek bilateral, regional dan internasional untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama bilateral adalah prinsip yang mutlak untuk menjaga perdamaian dunia, memenuhi kebutuhan ekonomi, mengurus imigrasi, mengatasi masalah global, dan mencapai kemajuan budaya. Banyak pakar dalam studi hubungan internasional memberikan beragam definisi mengenai kerjasama bilateral. Dalam pandangan Didi Krisna, hubungan bilateral merujuk pada situasi di mana terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara dua entitas atau negara (Krisna, 1993).

Faktor-faktor yang mendorong kerjasama bilateral salah satu alasan utama adalah keterbatasan sumber daya alam yang membuat suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, negara tersebut memerlukan bantuan dan saling membantu dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, keterbatasan teknologi dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas juga menjadi alasan lainnya. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakatnya karena keterbatasan teknologi dan kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, negara tersebut memerlukan bantuan dan saling membantu dengan negara lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Keterbatasan kemampuan suatu negara dalam menyelesaikan konflik dan permasalahan dalam negeri juga menjadi alasan lainnya. Suatu negara tidak dapat menyelesaikan konflik dan permasalahan

dalam negeri karena keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, negara tersebut memerlukan kerjasama bilateral untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Keinginan suatu negara untuk menciptakan perdamaian dengan negara yang terlibat dalam hubungan bilateral juga menjadi alasan lainnya. Suatu negara ingin menciptakan perdamaian dengan negara yang terlibat dalam hubungan bilateral. Oleh karena itu, negara tersebut memerlukan kerjasama bilateral untuk menciptakan perdamaian.

Keinginan suatu negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya juga menjadi alasan lainnya. Suatu negara ingin meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Oleh karena itu, negara tersebut memerlukan kerjasama bilateral untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya.

Keinginan suatu negara untuk mempercepat pembangunan yang ada di dalam negerinya juga menjadi alasan lainnya. Suatu negara ingin mempercepat pembangunan yang ada di dalam negerinya. Oleh karena itu, negara tersebut memerlukan kerjasama bilateral untuk mempercepat pembangunan.

Dalam keseluruhan, kerjasama bilateral antara dua negara sangat penting dan dibutuhkan karena beberapa alasan yang telah disebutkan di atas. Kerjasama bilateral dapat membantu suatu negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, meningkatkan kemampuan

dalam menyelesaikan konflik, menciptakan perdamaian, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan, dan mempercepat pembangunan.

Dengan demikian, kerjasama bilateral adalah prinsip yang mutlak untuk menjaga perdamaian dunia, memenuhi kebutuhan ekonomi, mengurus imigrasi, mengatasi masalah global, dan mencapai kemajuan budaya. Ada sejumlah faktor yang berperan dalam membentuk hubungan antarnegara, termasuk kesepakatan, potensi konflik, atau bahkan kemungkinan adanya persahabatan. Dalam hubungan bilateral, negara harus tetap fleksibel namun patuh pada aturan yang berlaku agar dapat meraih manfaat yang diharapkan dari kerja sama tersebut. Keberhasilan suatu negara dalam menjalankan kerja sama dengan negara lain memiliki dampak yang besar dan dapat memperluas jejaring hubungan internasional (Rudy, 2002).

Kerjasama ekonomi bilateral adalah kesepakatan atau hubungan ekonomi antara dua negara. Dalam kerjasama ini, negara-negara tersebut bekerja sama untuk meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertukaran lainnya demi keuntungan bersama. Kerjasama bilateral dapat mencakup berbagai hal, mulai dari perjanjian perdagangan bebas hingga kemitraan dalam proyek-proyek investasi bersama. Tujuan dari kerjasama ekonomi bilateral adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat hubungan diplomatik antara negara-negara tersebut. Kerjasama ini bisa melibatkan berbagai sektor,

termasuk perdagangan barang dan jasa, investasi, teknologi, pariwisata, pendidikan, dan lain sebagainya.

Kesepakatan-kesepakatan yang terjadi dalam kerjasama bilateral tidak luput dari konflik yang muncul dari hubungan antarnegara, dan setiap kerjasama yang dilakukan pastinya mengalami problem dan masalah yang muncul dari kerjasama tersebut, seperti yang terjadi dalam hubungan bilateral Indonesia dengan beberapa negara. Untuk menyelesaikan sengketa, metode yang memungkinkan adalah melalui pengadilan nasional dan internasional, yang harus ditempuh apabila cara-cara penyelesaian yang ada ternyata tidak berhasil. Penyelesaian sengketa dagang melalui badan peradilan biasanya dimungkinkan ketika para pihak sepakat, yang dituangkan dalam klausul kontrak. Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional, dan memungkinkan penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang lebih efektif dan lebih keras (Arya and Candra, 2022).

E. Variabel Operation

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua variabel yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu variabel independen dan variabel dependen, variabel independen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah diplomasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi, sedangkan variabel dependennya adalah Implementasi kerjasama *belt and road*

initiative. kedua variabel tersebut akan dianalisa di tingkat internasional dengan penjabaran operasionalisasi variabel sebagai berikut.

Tabel 1.1 Variabel Operation Penelitian

<i>Dependent Variable</i>	<i>Independent Variable</i>	<i>Category</i>	<i>Indicator</i>
IMPLEMENTASI KERJASAMA <i>BELT AND ROAD INITIATIVE</i>	DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA DI BAWAH KEPEMIMPINAN JOKOWI	<i>CAPITAL INJECTION/ INVESTMENT</i>	Jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia melalui kerjasama BRI.
		<i>INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT</i>	Jumlah dan jenis proyek BRI yang diikuti atau dijalankan oleh Indonesia. Kemajuan dan perkembangan proyek infrastruktur yang didukung oleh BRI di Indonesia.
		<i>LEVEL DIPLOMASI INDONESIA</i>	Jumlah perjanjian kerjasama ekonomi yang telah ditandatangani oleh Indonesia dalam konteks BRI, Jumlah kunjungan diplomatik ke negara-negara mitra BRI oleh pejabat Indonesia

Ketiga aspek yang telah dipaparkan di atas akan diproyeksikan dalam proses analisis data, sehingga akan dipaparkan mengenai diplomasi ekonomi Indonesia dalam implementasi kerjasama *belt and road initiative*: tantangan dan prospek di bawah kepemimpinan Jokowi. Pertama, mengenai aspek suntikan modal atau investasi asing yang dimana jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia melalui kerjasama *Belt and road initiative* (BRI) mencerminkan seberapa besar kontribusi BRI terhadap pertumbuhan

ekonomi Indonesia. Investasi tersebut dapat berasal dari negara-negara mitra BRI yang tertarik untuk berinvestasi dalam proyek-proyek infrastruktur, industri, atau sektor-sektor lainnya di Indonesia.

Dengan adanya investasi asing melalui BRI, Indonesia dapat memperoleh dana tambahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk meningkatkan konektivitas dan daya saing ekonomi. Selain itu, investasi tersebut juga dapat membuka peluang kerjasama yang lebih luas antara Indonesia dan negara-negara mitra BRI, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, pemantauan dan evaluasi terhadap jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia melalui kerjasama BRI menjadi penting dalam menilai dampak dan manfaat kerjasama tersebut bagi perekonomian Indonesia.

Selanjutnya, mengenai aspek *infrastructure development* menjelaskan tentang Jumlah dan jenis proyek *Belt and road initiative* (BRI) yang diikuti atau dijalankan oleh Indonesia menunjukkan tingkat keterlibatan negara dalam inisiatif tersebut. Proyek-proyek ini dapat mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan proyek energi seperti pembangkit listrik atau pembangunan sumber energi terbarukan. Selain itu, proyek-proyek dalam sektor industri, pariwisata, dan teknologi juga dapat termasuk dalam kategori ini. Melalui partisipasi dalam berbagai jenis proyek BRI, Indonesia berharap untuk

meningkatkan konektivitas regional, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan memperluas kerjasama internasional.

Kemajuan dan perkembangan proyek infrastruktur yang didukung oleh BRI di Indonesia mencerminkan dampak nyata dari kerjasama tersebut terhadap pembangunan dalam negeri. Ini meliputi status dan progres pembangunan fisik proyek-proyek, termasuk tahap perencanaan, konstruksi, dan implementasi. Evaluasi kemajuan proyek-proyek tersebut mencakup aspek-aspek seperti ketersediaan dana, penyelesaian waktu, kualitas konstruksi, serta dampak sosial dan lingkungan yang dihasilkan. Informasi mengenai kemajuan proyek BRI di Indonesia memberikan gambaran tentang efektivitas kerjasama tersebut dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di negara ini.

Untuk aspek level diplomasi ekonomi Indonesia, Jumlah perjanjian kerjasama ekonomi yang telah ditandatangani oleh Indonesia dalam konteks *Belt and road initiative* (BRI) mencerminkan tingkat komitmen Indonesia terhadap kerjasama ini. Perjanjian-perjanjian tersebut meliputi berbagai aspek ekonomi seperti perdagangan, investasi, kerjasama teknis, dan pengembangan infrastruktur. Melalui penandatanganan perjanjian ini, Indonesia berupaya memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara mitra BRI dan memperluas kesempatan untuk kerjasama yang saling menguntungkan. Evaluasi jumlah dan kualitas perjanjian kerjasama ekonomi ini memberikan

gambaran tentang sejauh mana Indonesia dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh BRI untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya.

Jumlah kunjungan diplomatik ke negara-negara mitra *Belt and road initiative* (BRI) oleh pejabat Indonesia mencerminkan tingkat interaksi dan komunikasi antara Indonesia dengan negara-negara tersebut dalam kerangka kerjasama BRI. Kunjungan-kunjungan ini melibatkan pejabat tingkat tinggi seperti presiden, menteri, duta besar, atau delegasi khusus yang bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral, mendiskusikan kerjasama ekonomi, serta menjajaki peluang investasi dan perdagangan. Evaluasi jumlah kunjungan diplomatik ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa aktif Indonesia dalam menjalin hubungan dengan negara-negara mitra BRI dan sejauh mana diplomasi ekonomi Indonesia dapat memajukan kepentingan nasional dalam kerangka BRI.

F. Metode Penelitian

1. Teknik Analisis

Teknik analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan teknik analisis kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan latar alamiah untuk menafsirkan sebuah peristiwa yang terjadi serta dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Berbeda dengan teknik analisis kuantitatif yang umumnya menggunakan statistik, penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan

pengumpulan data, analisis, lalu diinterpretasikan (Fadli, 2021). Melalui teknik ini, maka masalah akan dianalisis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh kemudian saling dihubungkan, lalu menarik argumen atau kesimpulan yang tepat dari proses tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data–data dari sejumlah literatur yang berhubungan dengan penelitian, yaitu berupa buku, jurnal ilmiah, laporan, surat kabar, dan artikel dari internet. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data (Sari M. , 2020).

3. Tipe Penelitian

Dalam proses menganalisis masalah yang telah diuraikan di atas, penulis akan menggunakan tipe penelitian deskriptif, yaitu tipe penelitian untuk menggambarkan serta menganalisa berbagai situasi yang menjadi bagian dari permasalahan yang diteliti. Tujuan penggunaan metode penelitian deskriptif ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis serta menginterpretasikan hal-hal yang berkaitan dengan diplomasi ekonomi indonesia dalam implementasi kerjasama *Belt and Road Initiative*: tantangan dan prospek di bawah kepemimpinan jokowi

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan digunakan oleh penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti buku, artikel internet, jurnal ilmiah, website resmi atau referensi lain yang berkaitan dengan penelitian. Menurut (Hardani, et al., 2020), data sekunder adalah data yang telah tersedia sebelumnya, yang dikumpulkan dari sumber-sumber tidak langsung atau tangan kedua, misalnya dari sumber-sumber tertulis milik pemerintah atau perpustakaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Diplomasi Ekonomi

Diplomasi ekonomi berakar jauh di dalam catatan sejarah, yang dimulai sejak era ketika perdagangan dan konflik saling terkait secara rumit. Konsep ini dapat ditelusuri ke praktik-praktik awal diplomasi selama masa perang dan perdagangan di peradaban kuno. Salah satu contoh penting adalah utusan perdagangan Kekaisaran Ottoman, yang dapat dilihat sebagai pendahulu diplomasi ekonomi modern. Bentuk-bentuk awal diplomasi ekonomi ini ditandai dengan penggunaan perdagangan sebagai sarana untuk membina aliansi, mengamankan perdamaian, dan memproyeksikan kekuatan.

Lanskap diplomasi ekonomi mengalami transformasi yang signifikan setelah berakhirnya Perang Dingin. Dengan bubarnya tatanan dunia bipolar, terjadi peningkatan interaksi ekonomi antar negara. Periode ini melihat negara-negara menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka untuk mencerminkan semakin pentingnya pertimbangan ekonomi. Mereka mulai merestrukturisasi kerangka kerja politik dan diplomatik mereka untuk mengintegrasikan tujuan ekonomi secara lebih terpusat. Pergeseran ini menggarisbawahi perlunya negara-negara untuk terlibat secara ekonomi dalam skala global, menjadikan diplomasi ekonomi sebagai elemen penting dalam hubungan internasional mereka.

Sejak akhir 1980-an dan seterusnya, pengakuan terhadap isu-isu ekonomi sebagai komponen penting dalam diplomasi menyebabkan perubahan mendasar dalam cara negara mendekati kebijakan luar negeri. Meningkatnya keterkaitan ekonomi global mengharuskan negara-negara untuk beradaptasi dengan memperkuat kapasitas ekonomi mereka dan mengevaluasi kembali strategi diplomatik mereka. Adaptasi ini merupakan respons terhadap perubahan eksternal yang meningkatkan peran kegiatan ekonomi dalam hubungan internasional, dan menjadikan diplomasi ekonomi sebagai landasan dari politik luar negeri modern (Chohan, 2021).

Pada intinya, diplomasi ekonomi telah berevolusi dari praktik-praktik kuno yang memanfaatkan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan politik dan strategis menjadi alat yang sangat diperlukan dalam hubungan internasional kontemporer. Perkembangannya mencerminkan interaksi dinamis antara keharusan ekonomi dan upaya diplomatik di berbagai zaman sejarah.

Sejarah diplomasi ekonomi bisa ditelusuri kembali ke masa awal diplomasi yang berkaitan dengan perang dan perdagangan, atau yang dikenal sebagai diplomasi perang dan perdagangan klasik (Okano-Heijmans, 2011). Pada masa Kekaisaran Ottoman, utusan dagang yang dikirimkan dapat dianggap sebagai pendahulu dari diplomasi ekonomi modern (Rana dan Chatterjee, 2011). Periode ini melihat negara-negara melakukan reorientasi strategi diplomatik mereka agar lebih selaras dengan ekonomi global yang semakin terhubung. Pemerintah mulai

merestrukturisasi kerangka kerja kebijakan luar negeri mereka untuk memprioritaskan pertimbangan ekonomi, menjadikan diplomasi ekonomi sebagai pilar utama keterlibatan internasional mereka.

Negara-negara menyesuaikan kebijakan luar negeri mereka untuk merespons perubahan global, dengan mengintegrasikan strategi ekonomi ke dalam kegiatan diplomatik mereka. Evolusi ini merupakan respons terhadap perubahan eksternal dalam lanskap global, di mana fungsi ekonomi menjadi komponen penting dalam upaya diplomasi. Saat ini, diplomasi ekonomi mencakup berbagai kegiatan, mulai dari mempromosikan perdagangan dan investasi hingga berpartisipasi dalam lembaga-lembaga ekonomi internasional dan mendorong kerja sama ekonomi. Pada intinya, perjalanan diplomasi ekonomi dari utusan perdagangan Utsmaniyah hingga perannya saat ini sebagai aspek kunci hubungan internasional menyoroti signifikansi yang bertahan lama dan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan ekonomi dan politik global yang terus berubah (Peter and Moons, 2018).

Setelah berakhirnya Perang Dingin, hubungan ekonomi antar negara mengalami peningkatan yang signifikan, memaksa negara-negara untuk mengadaptasi kebijakan luar negeri mereka. Adaptasi ini termasuk restrukturisasi infrastruktur dan alat-alat politik luar negeri, sehingga diplomasi ekonomi menjadi fokus utama. Sejak akhir 1980-an, negara-negara mulai melihat pentingnya aspek ekonomi dalam diplomasi dan melakukan perubahan penting dalam strategi kebijakan luar negeri

mereka. Pada dasarnya, restrukturisasi ini adalah respon terhadap perubahan global yang menekankan ekonomi sebagai salah satu pilar utama dalam diplomasi internasional.

Dari sudut pandang Donna Lee dan Brian Hocking, diplomasi ekonomi beroperasi dalam ekonomi dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung. Globalisasi, yang didorong oleh teknologi baru, mengarah pada aktivitas ekonomi yang lebih besar di pasar nasional, regional, dan internasional. Arus modal, perdagangan, jasa, orang, ide, dan informasi antar negara, perusahaan, dan individu semakin meningkat karena globalisasi. Para diplomat berperan sebagai agen globalisasi, yang secara langsung terlibat dalam menciptakan, mengembangkan, dan mengatur pasar dan modal melalui negosiasi perdagangan, perjanjian keuangan, dan kegiatan komersial. Peran mereka melampaui diplomasi tradisional.

Ketika globalisasi mengintegrasikan pasar dan meningkatkan saling ketergantungan ekonomi, diplomasi menjadi sangat penting untuk mengelola risiko dan meraih peluang. Para diplomat memfasilitasi pembangunan ekonomi dan integrasi pasar. Diplomasi ekonomi beroperasi pada batas-batas hubungan internasional. Isu-isu seperti perubahan iklim melampaui batas-batas negara tetapi memiliki implikasi ekonomi yang signifikan. Diplomasi memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan global tersebut. Selain itu, runtuhnya hambatan domestik-sistemik dalam ekonomi dunia mengarah pada domestikasi diplomasi.

Diplomasi publik, lebih dari sekadar manajemen citra, mempromosikan tujuan strategis negara dalam bidang ekonomi (Lee and Hocking, 2018).

Ada empat bentuk utama diplomasi ekonomi dalam mengelola globalisasi kontemporer: diplomasi komersial, diplomasi perdagangan, diplomasi keuangan, dan layanan visa konsuler dalam kaitannya dengan peningkatan arus imigrasi. Diplomasi komersial melibatkan upaya untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah asing dan keputusan peraturan yang mempengaruhi perdagangan dan investasi global. Cara ini sangat penting untuk mempromosikan ekspor, menarik investasi asing, dan mendukung bisnis domestik di pasar internasional. Aktor-aktor utama dalam diplomasi komersial meliputi organisasi promosi perdagangan, kedutaan besar, dan asosiasi bisnis.

Diplomasi perdagangan berfokus pada negosiasi perjanjian perdagangan dan penyelesaian sengketa perdagangan. Diplomasi perdagangan menyoroti peran aktor, jaringan, dan institusi non-negara dalam membentuk hubungan perdagangan. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan perjanjian perdagangan regional seperti NAFTA dan Uni Eropa merupakan perkembangan yang signifikan dalam diplomasi perdagangan. Modus ini mencakup negosiasi perdagangan multilateral, regional, dan bilateral, yang sering kali melibatkan interaksi yang kompleks antara aktor negara dan non-negara.

Diplomasi keuangan melibatkan lembaga-lembaga keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia

(WB) untuk mengelola stabilitas dan pembangunan keuangan global. Hal ini mencakup negosiasi mengenai peraturan keuangan, mengatasi krisis keuangan, dan mengkoordinasikan kebijakan moneter. Peran kementerian keuangan, bank sentral, dan entitas keuangan lainnya sangat penting dalam domain ini.

Layanan visa konsuler menangani arus orang lintas batas, yang telah menjadi lebih signifikan dengan adanya globalisasi. Hal ini termasuk mengelola migrasi, menyediakan layanan konsuler, dan memastikan keamanan. Pengembangan kebijakan visa bersama, seperti yang ada di Uni Eropa, menggambarkan aspek kerja sama layanan konsuler. Modus ini juga menanggapi peningkatan mobilitas dan ancaman seperti terorisme dan kejahatan terorganisir, yang sering kali melibatkan kolaborasi antara layanan konsuler dan lembaga penegak hukum. Model-model diplomasi ekonomi ini saling terkait dan mencerminkan sifat hubungan internasional dan ekonomi global yang terus berkembang. Mereka mencakup berbagai macam aktor dan proses, menyoroti pentingnya peserta negara dan non-negara dalam lanskap diplomatic (Lee and Hocking, 2018).

Diplomasi ekonomi merupakan salah satu wujud nyata dari kebijakan luar negeri yang berfungsi sebagai alat strategis bagi negara untuk memajukan kepentingannya di panggung internasional. Diplomasi ekonomi mengintegrasikan praktik-praktik diplomasi tradisional seperti pengumpulan informasi intelijen, lobi, representasi, negosiasi, dan advokasi untuk memajukan kebijakan ekonomi suatu

negara. Pendekatan ini menyoroti keterkaitan antara dimensi ekonomi dan politik dalam diplomasi, dengan menyadari bahwa batas-batas antara kedua bidang ini semakin kabur dan sering kali tidak dapat dibedakan

Secara historis, diplomasi ekonomi telah memainkan peran penting dalam membangun dan mempertahankan hubungan perdagangan, seperti yang terlihat pada contoh Thailand, di mana kepentingan perdagangan dengan Tiongkok dan Eropa secara signifikan mempengaruhi upaya diplomatik. Namun, diplomasi ekonomi modern melampaui pandangan tradisional yang berpusat pada negara, dengan melibatkan berbagai aktor dari berbagai kementerian, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Pendekatan kolaboratif ini, yang sering disebut sebagai "sistem diplomasi nasional", menekankan perlunya upaya terkoordinasi untuk mencapai tujuan diplomasi, dengan mengintegrasikan tanggung jawab dan kepentingan ekonomi di berbagai tingkat pemerintahan

Evolusi diplomasi ekonomi mencerminkan kompleksitas globalisasi, di mana diplomasi ekonomi mencakup diplomasi komersial, diplomasi perdagangan, dan diplomasi keuangan. Perluasan ini membutuhkan strategi diplomasi yang lebih terintegrasi, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk menangani agenda ekonomi yang lebih luas dalam diplomasi. Pendekatan semacam itu memastikan bahwa diplomasi ekonomi tetap menjadi komponen penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara, yang secara efektif menavigasi tantangan dan peluang yang dihadirkan oleh lanskap ekonomi global (Chohan, 2021).

Diplomasi ekonomi memainkan peran penting dalam kerja sama Belt and Road Initiative (BRI) di Indonesia, di mana kedua negara berkolaborasi dalam berbagai proyek infrastruktur besar seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan pelabuhan, dan kawasan industri. Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia mampu menarik investasi asing langsung dari Tiongkok, yang berkontribusi pada peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan seperti keberlanjutan utang dan pengaruh ekonomi Tiongkok yang semakin besar memerlukan strategi negosiasi yang cermat dan diversifikasi sumber investasi. Upaya diplomasi ini mencerminkan hubungan strategis dan komitmen kedua negara untuk memajukan kepentingan ekonomi bersama sambil mengelola risiko yang mungkin timbul.

B. KERJASAMA BILATERAL

Fenomena kerjasama di era global saat ini telah berkembang secara signifikan. Kerjasama internasional tidak lagi sekadar menjadi tren di kalangan masyarakat transnasional, melainkan telah bertransformasi menjadi suatu kebutuhan mendesak. Perkembangan ini mencerminkan perubahan dalam cara pandang masyarakat internasional yang semakin menyadari pentingnya sinergi antarnegara dalam berbagai aspek kehidupan.

Peningkatan kerjasama ini terjadi karena individu maupun negara menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhannya secara

mandiri. Dalam dunia yang semakin kompleks dan saling terkait, ketergantungan antarnegara menjadi semakin nyata. Hal ini mendorong negara-negara untuk membentuk aliansi dan kerjasama guna mengatasi tantangan global dan mencapai tujuan bersama yang tidak mungkin dicapai secara sendiri-sendiri. Definisi kerja sama menurut Holsti dapat dibagi menjadi lima, antara lain adalah:

1. Pandangan bahwa dua atau lebih nilai kepentingan atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.
2. Persetujuan atas masalah tertentu antara dua negara atau lebih untuk memanfaatkan persamaan konflik kepentingan.
3. Pandangan atau harapan suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lain dapat membantu negara tersebut untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
4. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dibuat untuk melaksanakan tujuan tersebut.
5. Transaksi antar negara untuk memenuhi kesepakatan mereka (Holsti, 1987)

Menurut definisi kerjasama internasional yang dijelaskan oleh K.J. Holsti, terdapat beberapa poin yang menguraikan terbentuknya hubungan kerjasama. Pertama, adanya dua atau lebih kepentingan yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil. Kolaborasi bisa terjadi dalam berbagai konteks. Sebagian besar transaksi dan interaksi kolaboratif

berlangsung secara langsung antara dua negara yang sedang menghadapi masalah atau isu tertentu yang memiliki kepentingan bersama (Holsti, 1987).

Menurut Koesnadi Kartasasmita, kerjasama internasional menjadi sebuah keharusan karena adanya hubungan saling ketergantungan dan semakin kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Hubungan saling ketergantungan ini sangat mempengaruhi intensitas kerjasama. Semakin tinggi tingkat ketergantungan, semakin tinggi pula intensitas kerjasama. Kerjasama terjadi ketika para pelaku menyesuaikan perilaku mereka sesuai dengan preferensi aktual atau yang diantisipasi dari pihak lain (Kartasasmita, 1977)

Konsep kerja sama internasional, seperti yang kita pahami saat ini, mulai terbentuk pada awal tahun 1980-an, didorong oleh pilihan rasional dan pendekatan berbagai macam theory. Maka dapat dilihat bahwa interaksi strategis antara para aktor dengan tujuan yang saling bertentangan namun memiliki kepentingan yang sama. Maka dari itu, kerja sama dipandang sebagai serangkaian situasi tawar-menawar di mana para pelaku menegosiasikan kesepakatan yang saling menguntungkan meskipun memiliki tujuan yang berbeda (Dai, Snidal, and Sampson, 2010).

Teori hubungan internasional mencakup berbagai perspektif, mulai dari pendekatan rasionalis hingga konstruktivis. Teori-teori rasionalis, terutama yang berfokus pada teori permainan dan pilihan rasional, telah menjadi pusat untuk memahami kerja sama internasional. Teori-teori ini mengasumsikan bahwa para aktor bersifat rasional dan

berusaha memaksimalkan kepentingan mereka, yang mengarah pada kerja sama jika hal tersebut merupakan kepentingan terbaik mereka. Di sisi lain, teori konstruktivis menekankan peran struktur sosial, identitas, dan norma dalam membentuk perilaku negara dan kemungkinan kerja sama. Bersama-sama, teori-teori ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk menganalisis interaksi internasional. bidang kerja sama internasional telah berkembang melalui integrasi berbagai pendekatan teoritis dan penerapan teori-teori ini pada isu-isu praktis. Sejarah hubungan internasional, ditambah dengan perkembangan teori-teori rasionalis dan konstruktivis, memberikan konteks yang kaya untuk memahami dinamika kerja sama bilateral dan multilateral.

Dalam hubungan internasional, kerjasama bilateral merupakan kerjasama timbal balik yang secara umum dikenal dengan istilah hubungan bilateral. Berkaitan dengan konsep hubungan bilateral, Didi Krisna dalam kamus politik internasionalnya mengatakan bahwa: “Hubungan bilateral adalah suatu kondisi yang menggambarkan adanya hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi atau hubungan timbal balik yang terjadi antara dua pihak atau dua negara dan negara berperan sebagai aktor utama dalam pelaksanaan hubungan bilateral tersebut.” Kerja sama bilateral ini bertujuan untuk menciptakan perdamaian, mempercepat proses penyelesaian masalah antara kedua negara yang terlibat, dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Dalam hal ini, lebih memperhatikan struktur sosial, politik, budaya, dan ekonomi sehingga

menghasilkan hubungan yang harmonis antara kedua negara (Didi Krisna, 1993).

Kerja sama bilateral memainkan peran penting dalam hubungan internasional, yang melibatkan interaksi langsung antara dua negara yang bertujuan untuk menumbuhkan keuntungan bersama dan menyelesaikan konflik. Hubungan ini dapat mencakup berbagai kegiatan, termasuk perjanjian perdagangan, pertukaran budaya, dan kemitraan keamanan. Kerja sama bilateral sering kali terbukti lebih fleksibel dan efektif daripada upaya multilateral karena perhatian dan sumber daya yang terfokus yang dapat didedikasikan untuk hubungan tersebut oleh negara-negara yang terlibat. Bentuk keterlibatan langsung ini memungkinkan negara-negara untuk menangani masalah-masalah spesifik yang berkaitan dengan hubungan bilateral mereka dan menyesuaikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka yang unik.

Secara historis, hubungan bilateral telah menjadi landasan diplomasi, dengan akarnya yang berasal dari abad ketujuh belas di antara kerajaan-kerajaan Eropa. Kongres Westphalia pada tahun 1648 menetapkan kerangka kerja bagi negara-negara berdaulat untuk terlibat dalam misi diplomatik resmi, yang kemudian menjadi dasar bagi praktik diplomasi bilateral modern. Selama berabad-abad, hubungan ini telah berevolusi, mencerminkan perubahan dalam dinamika kekuatan global dan kepentingan nasional. Terlepas dari munculnya organisasi dan perjanjian multilateral, kerja sama bilateral tetap penting untuk mengelola urusan

internasional, terutama dalam menegosiasikan kesepakatan perdagangan, menyelesaikan konflik, dan membangun aliansi strategis (Pannier, 2019).

Signifikansi strategis dari kerja sama bilateral terlihat dari kemampuannya untuk mempromosikan kepentingan nasional dan menyusun negosiasi internasional. Melalui kementerian luar negeri, kedutaan besar, dan konsulat, negara-negara mengejar tujuan ekonomi, budaya, dan politik di tingkat bilateral. Pendekatan ini memungkinkan negara-negara untuk membangun koalisi dan mengadvokasi kepentingan mereka secara lebih efektif dalam pengaturan multilateral. Misalnya, negosiasi bilateral sering kali menjadi dasar bagi perjanjian multilateral yang lebih luas, karena kepentingan bersama pertama-tama dibangun di antara masing-masing negara sebelum diajukan ke badan-badan internasional yang lebih besar.

KTT bilateral dan kunjungan oleh kepala negara atau pemerintah merupakan komponen penting dari kerja sama ini, yang menjalankan berbagai fungsi seperti menandakan pentingnya hubungan, mengkonsolidasikan hubungan, dan menandatangani perjanjian. Pertemuan tingkat tinggi ini sering kali membahas isu-isu yang tidak dapat diselesaikan melalui jalur diplomatik biasa, yang menyoroti pentingnya hubungan pribadi antara para pemimpin. Identitas dan peran para pemimpin ini dapat secara signifikan memengaruhi jangka waktu hubungan bilateral, terutama dalam rezim demokratis di mana dinamika

antarpribadi memainkan peran penting dalam interaksi diplomatik (Pannier, 2019).

Kerja sama semacam itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk perjanjian perdagangan, aliansi keamanan, dan kesepakatan lingkungan. Efektivitas kerja sama bilateral sering kali bergantung pada desain dan implementasi perjanjian, lingkungan strategis, dan politik domestik negara-negara yang terlibat. Penelitian telah menunjukkan bahwa perjanjian bilateral yang dirancang dengan baik dapat menciptakan jaringan kerja sama yang kuat yang meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas dalam hubungan internasional (Dai, Snidal, and Sampson, 2010).

Kerja sama bilateral telah menjadi semakin penting sejak pertengahan abad ke-20, hubungan bilateral tetap menjadi inti dari diplomasi global. Hubungan ini memberikan landasan untuk menangani isu-isu bilateral yang spesifik, membina kerja sama, dan membangun kemitraan strategis. Fleksibilitas dan sifat langsung dari kerja sama bilateral menjadikannya alat yang sangat diperlukan bagi negara-negara yang ingin menavigasi lanskap hubungan internasional yang kompleks. Seiring dengan berkembangnya tantangan global, pentingnya menjaga hubungan bilateral yang kuat terus menjadi aspek penting dalam kebijakan luar negeri dan diplomasi internasional (Pannier, 2019).

Kerjasama bilateral merupakan salah satu bentuk interaksi antarnegara yang memiliki peran penting dalam membangun hubungan

diplomasi yang kuat dan saling menguntungkan. Melalui kerjasama ini, dua negara dapat mengembangkan berbagai sektor seperti ekonomi, pendidikan, teknologi, dan keamanan. Kerjasama bilateral memungkinkan negara-negara untuk berbagi sumber daya, pengetahuan, dan keahlian, sehingga dapat mengatasi tantangan bersama dengan lebih efektif. Selain itu, kerjasama ini juga memperkuat posisi kedua negara di kancah internasional, meningkatkan stabilitas regional, dan membuka peluang baru bagi perkembangan ekonomi dan sosial.

Kesimpulannya, kerjasama bilateral tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi negara-negara yang terlibat, tetapi juga berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas global. Dengan menjalin hubungan yang erat dan saling percaya, negara-negara dapat mengurangi ketegangan dan konflik, serta membangun fondasi yang kokoh untuk kerjasama multilateral yang lebih luas. Kerjasama bilateral menjadi fondasi yang krusial dalam era globalisasi, di mana tantangan dan peluang semakin bersifat lintas batas dan memerlukan pendekatan kolektif untuk dihadapi.

C. PENELITIAN TERDAHULU

Dalam penulisan penelitian ini, tentunya penulis akan menyajikan beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian pertama yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu. “Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping”

yang ditulis oleh Syaiful Anam dan Ristiyani (Anam and Ristiyani, 2018).

Penelitian ini mengungkap tiga alasan utama di balik kebijakan luar negeri Tiongkok. Pertama, Tiongkok memiliki kepentingan untuk mengamankan jalur pasokan energi dari Timur Tengah dan Asia Tengah melalui kerjasama dengan negara-negara di Asia Selatan. Hal ini menunjukkan pentingnya stabilitas pasokan energi bagi perkembangan ekonomi Tiongkok.

Kedua, ambisi Tiongkok untuk mengambil alih peran kepemimpinan di kawasan Asia terlihat melalui persaingannya dengan Jepang dalam pembiayaan proyek kereta cepat. Ini mencerminkan upaya Tiongkok untuk memperkuat pengaruhnya dan menunjukkan kemampuan teknologinya di kawasan tersebut.

Ketiga, Tiongkok berusaha menantang dominasi Amerika Serikat di bidang keamanan dan ekonomi. Langkah ini menandakan upaya Tiongkok untuk memperluas pengaruh globalnya dan mengurangi ketergantungan pada kekuatan Barat. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi referensi komparatif bagi studi-studi serupa di masa depan serta memberikan kontribusi pemikiran bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam dinamika geopolitik di kawasan Asia.

Penelitian berjudul "Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping" berfokus pada analisis

mendalam mengenai kebijakan BRI dari perspektif Tiongkok. Studi ini mengeksplorasi bagaimana BRI dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah Tiongkok, serta tujuan strategis, ekonomi, dan politik di balik inisiatif tersebut. Selain itu, penelitian ini menyoroti dampak BRI terhadap hubungan internasional Tiongkok dan posisinya di panggung global, dengan menekankan strategi nasional dan kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping.

Sebaliknya, penelitian berjudul "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi Kerjasama Belt And Road Initiative: Tantangan Dan Prospek Di Bawah Kepemimpinan Jokowi" berfokus pada partisipasi dan implementasi BRI oleh Indonesia dalam konteks diplomasi ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Studi ini menganalisis bagaimana Indonesia merespon dan berkolaborasi dengan Tiongkok dalam kerangka BRI, mengeksplorasi tantangan dan prospek yang dihadapi dalam kerjasama tersebut, serta dampaknya terhadap ekonomi dan kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini menyoroti strategi diplomasi ekonomi dan adaptasi kebijakan luar negeri Indonesia untuk memanfaatkan BRI demi kepentingan nasional (Anam and Ristiyani, 2018).

Dalam penulisan penelitian kedua ini, tentunya penulis akan menyajikan beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian pertama yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu. "Pengaruh BRI Terhadap Kerja Sama Ekonomi Tiongkok-Kamboja

Periode 2013-2018” yang ditulis oleh Alfi Widho Ilham (Ilham, 2021).

Hasil penelitian ini mengungkap bahwa kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan Kamboja didasarkan pada prinsip keuntungan bersama, yang menjadi dasar bagi peningkatan kerjasama di berbagai sektor. Hal ini terbukti dengan adanya pertumbuhan signifikan dalam pembangunan Zona Ekonomi Khusus Sihanoukville (SSEZ), yang merupakan salah satu proyek utama di antara kedua negara. Selain itu, terdapat peningkatan yang nyata dalam sektor energi, di mana kerjasama ini menghasilkan manfaat besar bagi kedua belah pihak.

Selain pembangunan SSEZ dan sektor energi, penelitian ini juga menunjukkan adanya peningkatan dalam sektor perdagangan dan pariwisata antara Tiongkok dan Kamboja. Perdagangan antara kedua negara mengalami pertumbuhan yang signifikan, yang memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Di sektor pariwisata, jumlah wisatawan dari Tiongkok ke Kamboja terus meningkat, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian Kamboja. Keseluruhan peningkatan ini mencerminkan bagaimana kerjasama ekonomi yang didasarkan pada keuntungan bersama dapat membawa manfaat yang berkelanjutan bagi kedua negara (Ilham, 2021).

Penelitian berjudul "Pengaruh BRI Terhadap Kerja Sama Ekonomi Tiongkok-Kamboja Periode 2013-2018" berfokus pada dampak inisiatif Belt and Road (BRI) terhadap kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan

Kamboja selama periode 2013-2018. Penelitian ini menganalisis bagaimana BRI mempengaruhi berbagai sektor ekonomi di Kamboja, termasuk pembangunan infrastruktur, energi, perdagangan, dan pariwisata. Dengan mengevaluasi keuntungan dan tantangan yang dihadapi oleh kedua negara, penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana BRI telah memperkuat hubungan ekonomi bilateral antara Tiongkok dan Kamboja.

Sementara itu, penelitian berjudul "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi Kerjasama Belt And Road Initiative: Tantangan Dan Prospek Di Bawah Kepemimpinan Jokowi" berfokus pada peran dan implementasi BRI dalam konteks diplomasi ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penelitian ini menganalisis bagaimana Indonesia berpartisipasi dalam BRI dan bagaimana kerjasama ini diimplementasikan untuk mendukung pembangunan nasional. Dengan mengeksplorasi tantangan dan prospek yang dihadapi Indonesia, penelitian ini menyoroti dampak ekonomi, politik, dan sosial dari kerjasama BRI serta kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan Jokowi.

Dengan demikian, perbedaan utama antara kedua penelitian ini terletak pada perspektif dan fokusnya. Penelitian pertama mengkaji dampak spesifik BRI pada kerjasama ekonomi bilateral antara Tiongkok dan Kamboja selama periode tertentu, sedangkan penelitian kedua mengeksplorasi bagaimana Indonesia mengimplementasikan dan

mengelola kerjasama BRI dalam konteks diplomasi ekonomi. Penelitian pertama menekankan evaluasi hasil kerjasama ekonomi antara dua negara, sementara penelitian kedua menyoroti strategi, tantangan, dan prospek diplomasi ekonomi Indonesia dalam kerangka BRI.

Dalam penulisan penelitian ketiga ini, tentunya penulis akan menyajikan beberapa referensi yang relevan dengan judul penelitian ini. Penelitian pertama yang relevan dengan judul penelitian ini yaitu. “Diplomasi Ekonomi Tiongkok Terhadap Indonesia : Studi Kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung” yang ditulis oleh Atika Silvia (Silvia, 2019).

Penelitian ini menunjukkan bahwa Tiongkok tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam skema pendanaannya, melainkan menerapkan pendekatan business to business. Selain itu, Tiongkok aktif dalam mempromosikan teknologi, melakukan transfer teknologi yang mendukung, serta memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia. Pendekatan ini menekankan keterlibatan sektor swasta dan kolaborasi langsung antara perusahaan-perusahaan dari kedua negara, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan proyek (Silvia, 2019).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Tiongkok telah menunjukkan fleksibilitas yang signifikan dalam mendahulukan kepentingan negara mitranya, khususnya Indonesia. Dengan tidak membebani APBN dan fokus pada peningkatan kapasitas lokal melalui transfer teknologi dan pelatihan, Tiongkok berupaya memastikan bahwa

kerjasama ini bermanfaat bagi perkembangan ekonomi dan teknologi Indonesia. Pendekatan yang berorientasi pada keuntungan bersama ini memperlihatkan komitmen Tiongkok dalam membangun hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dengan negara-negara mitranya.

Perbedaan antara penelitian "Diplomasi Ekonomi Tiongkok Terhadap Indonesia: Studi Kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung" dan "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi Kerjasama Belt And Road Initiative: Tantangan Dan Prospek Di Bawah Kepemimpinan Jokowi" mencerminkan pendekatan dan fokus yang berbeda terhadap inisiatif BRI (Belt and Road Initiative), meskipun keduanya membahas kerjasama ekonomi antara Tiongkok dan Indonesia.

Mengenai penelitian "Diplomasi Ekonomi Tiongkok Terhadap Indonesia: Studi Kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung" Penelitian ini menyoroti studi kasus konkret mengenai kerja sama infrastruktur antara Tiongkok dan Indonesia, khususnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Fokus utamanya adalah mengungkapkan bagaimana Tiongkok menerapkan diplomasi ekonomi dalam konteks proyek infrastruktur besar ini. Hal ini meliputi aspek seperti pendanaan proyek, teknologi yang diterapkan, serta dampak sosial dan ekonomi proyek tersebut terhadap Indonesia. Studi ini membahas secara mendalam dinamika hubungan bilateral dalam konteks proyek infrastruktur spesifik yang menjadi titik fokus kerja sama ekonomi antara kedua negara. Sedangkan penelitian berjudul "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi Kerjasama

Belt And Road Initiative: Tantangan Dan Prospek Di Bawah Kepemimpinan Jokowi” dimana penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas, mengulas respons Indonesia terhadap implementasi lebih umum dari BRI di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Fokus utamanya adalah bagaimana Indonesia, sebagai penerima kerjasama BRI, mengelola inisiatif ini untuk kepentingan nasionalnya. Penelitian ini mengeksplorasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mengimplementasikan proyek-proyek BRI, baik dari segi ekonomi, politik, maupun sosial. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi prospek jangka panjang bagi Indonesia, termasuk dampaknya terhadap kebijakan luar negeri dan pembangunan infrastruktur nasional.

Secara garis besar, "Diplomasi Ekonomi Tiongkok Terhadap Indonesia: Studi Kasus Kereta Cepat Jakarta-Bandung" lebih terfokus pada studi kasus konkret dari kerja sama infrastruktur tunggal antara Tiongkok dan Indonesia, sementara "Diplomasi Ekonomi Indonesia Dalam Implementasi Kerjasama Belt And Road Initiative: Tantangan Dan Prospek Di Bawah Kepemimpinan Jokowi" lebih menitikberatkan pada respons Indonesia secara keseluruhan terhadap inisiatif BRI dengan melihat berbagai aspek yang lebih luas.